

ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SEMARANG

Muhammad Khafid✉

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 22 Mei 2008. Disetujui: 20 Juni 2009. Dipublikasikan: September 2009

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi responden tentang pentingnya SAP 24, tahun 2005 dan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD di Kota Semarang. Sampel penelitian ini terdiri dari staf DPKD di Semarang, Jawa Tengah. Setelah mendistribusikan kuesioner, ada 64 responden yang mengembalikan kuesionernya. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kinerja dari semua PSAP (11 PSAP) dalam SAP 24, tahun 2005 lebih rendah daripada pentingnya SAP dan kinerja lembaga pemerintah tidak memuaskan.

Abstract

This study aims at getting the perception of respondents about the importance of SAP 24, 2005 and the performance of the local government in allocating the APBD in Semarang. The sample consists of the DPKD staff in Semarang, Central Java. After distributing the questioners, there were 64 respondents returned the questionnaire back. The results of study show that the performance level of all of the PSAP (11 PSAP) in the SAP 24, 2005 is lower than the importance of SAP and the performance of government institution is dissatisfied.

© 2009 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *importance level; performance level; SAP 24*

Pendahuluan

Good governance dengan tiga prinsipnya yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipatif adalah kata yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Konsep *governance* diyakini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kenegaraan yang ada. Konsep *good governance* merupakan konsep yang dijadikan dasar bagaimana membuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif menuju sebuah pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Konsep *good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, sehingga perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul segera dipecahkan. Salah satu upaya yang untuk mewujudkan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang menempatkan masyarakat tidak sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), tetapi menempatkan masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Selain itu berfungsi sebagai pelaku yang memiliki peran terhadap pengawasan.

Upaya pemerintah daerah untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya *good governance* tidaklah mudah. Hal dikarenakan masih terdapa-

nya kendala. Kendala pertama adalah pemerintah daerah yang sangat *familiar* dengan sistem anggaran tradisional (*line-item budgeting*). Kendala kedua adalah sistem anggaran yang belum berdasarkan kinerja. Kendala ketiga adalah masih kurangnya kepedulian para manajer di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan. Kendala keempat berkaitan dengan masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana untuk memberikan pelayanan minimum bagi masyarakatnya.

Berdasar latar belakang masalah di atas, dapat kita cermati bahwa pelaksanaan konsep *good governance* sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik harus segera dilaksanakannya, dan pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai upaya untuk mendukung terlaksananya program tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan keuangan pemerintahan yang kemudian diikuti pula dengan berbagai macam peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut kemudian timbul permasalahan sejauhmana peranan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab di Kota Semarang.

Governance, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yang adil dan dapat dipercaya. Adapun *World bank* mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggungjawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. *Asian development* sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Jelas bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana peranan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pelaksanaan konsep *good governance* ini dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab di Kota Semarang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek tertentu. Studi deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh adalah *valid* dan reliabel.

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai 12 bidang yaitu Administrasi Umum, Pertanian, Perindagkop, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Penataan Ruang, Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kependudukan, Kepariwisata. Sementara penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai pusat pembuatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Penelitian ini mengambil *setting* pada aparat pemerintah daerah dalam hal ini bagian keuangan dan bendaharawan umum daerah di Kota Semarang, dengan mengambil sampel seluruh karyawan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat alasan mengapa peneliti mengambil *setting* pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, pertama karena karyawan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah karyawan yang langsung berhubungan dengan pembuatan, pengelolaan dan pelaporan anggaran keuangan pemerintah daerah. Kerangka sampel dari penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berada di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan ukuran sebesar 64 responden.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik, dengan metode persepsi (*matrix performance-importance*), yang bertujuan untuk melihat tingkat kepentingan dan kinerja yang terjadi terhadap obyek penelitian saat penelitian dilakukan. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik Uji Tanda *rank* dari Wilcoxon, dengan pertimbangan alat uji ini dapat memberikan bobot lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi (Ghozali, 2002), sehingga dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang arah perbedaan sampel.

Hasil dan Pembahasan

Proses pengumpulan data dilakukan kurang lebih selama 3 minggu, mulai akhir september hingga pertengahan oktober 2007. Kuesioner yang dikirim sebanyak 100 kuesioner, dengan tingkat pengembalian sebanyak 74 kuesioner atau 74%, sedangkan sisanya sebesar 26 (26%) tidak kembali. Dari 74 kuesioner yang kembali hanya 64 kuesioner saja yang memenuhi syarat untuk diikuti dalam analisis akhir, sedangkan sisanya sebanyak 10 (10%) tidak dapat diolah karena tidak lengkap.

Uji validitas dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing pertanyaan telah dikelompokkan ke dalam variabel yang telah ditentukan. Untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing variabel dilakukan pengujian dengan faktor analisis. Uji faktor analisis ini dapat dilakukan terhadap nilai setiap variabel dengan *varimax rotation*. Sebelum dilakukan pengujian faktor analisis masing-masing instrumen analisis diharapkan memiliki nilai *kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequasi (kaiser MSA)* lebih besar dari 0,50, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang dikumpulkan tersebut tepat untuk faktor analisis dan mengindikasikan *cunstruct validity* dari masing-masing variabel (Kaiser & Rice, 1974).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha*, lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1978), selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan hasil pengujian Validitas dan Reliabilitas terhadap masing-masing item pertanyaan untuk setiap variabel, dapat dilihat bahwa tidak terdapat satupun dari masing-masing item dalam instrumen yang tidak *valid* dan tidak *reliabel*. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kaiser MSA
1. PSAP 1	0,7488	0,829
2. PSAP 2	0,7053	0,783
3. PSAP 3	0,6390	0,760
4. PSAP 4	0,7687	0,840
5. PSAP 5	0,8123	0,728
6. PSAP 6	0,7256	0,852
7. PSAP 7	0,8644	0,754
8. PSAP 8	0,7958	0,856
9. PSAP 9	0,6845	0,685
10. PSAP 10	0,7513	0,745
11. PSAP 11	0,6892	0,842

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 2. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 1

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja - Penting	<i>Negative Ranks</i>	29	19,09	553,50
	<i>Positive Ranks</i>	32	33,58	671,50
	<i>Ties</i>	3		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 3. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 2

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja - Penting	<i>Negative Ranks</i>	33	22,62	746,50
	<i>Positive Ranks</i>	29	22,14	243,50
	<i>Ties</i>	2		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 4. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 3

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	23	18,75	300,00
	<i>Positive Ranks</i>	37	25,34	735,00
	<i>Ties</i>	4		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 5. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 4

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	28	19,74	414,50
	<i>Positive Ranks</i>	33	30,38	911,50
	<i>Ties</i>	3		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 1 yang tersajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa PSAP No. 1 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 1 itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 2 yang tersajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa PSAP No. 2 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 2 itu sendiri. (lihat pada Tabel 3).

Dari hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 3 yang tersajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa PSAP No. 3 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 3 itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 4 yang tersajikan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa PSAP No. 4 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 4 itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis uji wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 5 yang tersajikan dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa PSAP No. 5 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 5 itu sendiri.

Dari hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 6 yang tersajikan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa PSAP No. 6 memiliki tingkat

kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 6 itu sendiri.

Dari hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 7 yang tersajikan dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa PSAP No. 7 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 7 itu sendiri.

Tabel 6. Hasil Uji Kerja Aparat terhadap PSAP No. 5

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja - Penting	<i>Negative Ranks</i>	30	24,97	424,50
	<i>Positive Ranks</i>	32	23,45	703,50
	<i>Ties</i>	2		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 7. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 6

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	29	18,17	527,00
	<i>Positive Ranks</i>	33	17,17	103,00
	<i>Ties</i>	2		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 8. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 7

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	28	15,14	272,50
	<i>Positive Ranks</i>	33	23,42	468,50
	<i>Ties</i>	3		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 9. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 8

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	25	25,17	906,00
	<i>Positive Ranks</i>	36	17,50	175,00
	<i>Ties</i>	3		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 10. Hasil Uji Kinerja Aparat terhadap PSAP No. 9

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
KINERJA – PENTING	<i>Negative Ranks</i>	19	21,87	415,50
	<i>Positive Ranks</i>	41	18,23	364,50
	<i>Ties</i>	4		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 11. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 10

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja – Penting	<i>Negative Ranks</i>	28	23,32	653,00
	<i>Positive Ranks</i>	33	16,00	208,00
	<i>Ties</i>	3		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Tabel 12. Hasil Uji Kinerja Aparat Terhadap PSAP No. 11

<i>Ranks</i>		<i>N</i>	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
Kinerja - Penting	<i>Negative Ranks</i>	24	19,25	462,00
	<i>Positive Ranks</i>	38	26,40	528,0
	<i>Ties</i>	2		
	<i>Total</i>	64		

a. Kinerja < Penting

b. Kinerja > Penting

c. Penting = Kinerja

Sumber: Data primer yang diolah, 2007

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 8 yang tersajikan dalam Tabel 9 menunjukkan bahwa PSAP No. 8 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 8 itu sendiri.

Dari hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 9 yang tersajikan dalam Tabel 10 menunjukkan bahwa PSAP No. 9 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 9 itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 10 yang tersajikan dalam Tabel 11 menunjukkan bahwa PSAP No. 10 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 10 itu sendiri. (lihat pada Tabel 11).

Dari hasil analisis uji Wilcoxon terhadap kinerja dan pengetahuan para aparat terhadap PSAP No. 11 yang tersajikan dalam Tabel 12 menunjukkan bahwa PSAP No. 11 memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar daripada kinerjanya, artinya bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut masih kurang jika dibandingkan tingkat kepentingan dari PSAP No. 11 itu sendiri. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepentingan dari PSAP No. 24 tahun 2005 lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja aparat pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa perlu dilakukan berbagai upaya terhadap hal ini untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah, mengingat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah yang berdasarkan pada SAP No. 24 tahun 2005 penting terutama jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*.

Dengan ditemukannya hasil penelitian mengenai kinerja aparat pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tersebut dapat diindikasikan bahwa pemahaman konsep dasar dan karakteristik laporan keuangan dari aparat pemerintah di Kota Semarang masih belum cukup. Hal ini terjadi karena reformasi penyusunan anggaran dan model pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah baru dilaksanakan dan diwajibkan oleh pemerintah. Selain itu berbagai peraturan yang berkaitan dengan tata cara dan perturan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah masih baru dikeluarkan. Berbagai permasalahan tersebut telah dirasakan dan diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan. Selain itu perlu diberikan penekanan terhadap pentingnya SAP No. 24 tahun 2005 misalkan dengan memberikan *deadline* terhadap kewajiban bagi setiap SKPD untuk membuat lapopran keuangan dan kinerja SKPD tersebut agar pengelolaan dan pelaporan keuangan instansi pemerintahan bisa diwujudkan demi tercapainya *good governance*.

Saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil temuan yang secara umum menunjukkan tingkat kepentingan lebih besar dibandingkan dengan kinerjanya, dari 11 PSAP yang terdapat dalam Standar Akuntansi pemerintahan ternyata tidak satupun yang menunjukkan kinerja aparat pemerintah terhadap 11 PSAP tersebut lebih besar dari tingkat kepentingannya. Oleh karena itu perlu diciptakan berbagai suasana yang mendukung, baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Daftar Pustaka

Budiharjo, A. dkk. 2004. Analisis Faktor-faktor Kepemimpinan Pasar dan Hubungannya dengan Market Share pada Industri Rumah Sakit Umum Pekalongan. *Smart*. Mei

- Development Assistant Committee. 1997. *Evaluation of Programs Promoting Participatory development & Good Governance*
- Ghozali, I. 2002. *Statistik Non Parametrik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan Negara
- _____, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- _____, UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- _____, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____, UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- _____, Peraturan Pemerintah (PP) No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- _____, Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan, dan Penyusunan Perhitungan APBD
- _____, Kepmendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan, dan Penyusunan Perhitungan APBD
- _____, Peraturan Pemerintah (PP) No.108/2000 tentang tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- _____, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan (SPAP) No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang SPAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang SPAP No. 03 Laporan Arus Kas
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang SPAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- Yani, A. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada